

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 6 /KEP.ADPIN/G3/2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN PENURUNAN ANGKA *UNMET NEED* DAN PENINGKATAN  
KB PASCA PERSALINAN TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menargetkan penurunan angka *Unmet Need* dan meningkatkan jumlah pengguna KB pasca persalinan, maka diperlukan langkah-langkah percepatan dimulai dari penajaman sasaran, peningkatan komitmen pemangku kebijakan, kerja sama lintas sektor serta mitra kerja, untuk meningkatkan jumlah penggerakan dan pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* di seluruh tingkatan wilayah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pemantauan Penurunan Angka *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang

- Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
  5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
  6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PEMANTAUAN PENURUNAN ANGKA *UNMET NEED* DAN PENINGKATAN KB PASCA PERSALINAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pemantauan Penurunan Angka *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan Tahun 2023, susunan keanggotaan dan tugas Tim Pemantauan Penurunan Angka *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan Penurunan Angka *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. penasehat;
- b. pengarah;
- c. tim pelaksana bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi; dan

- d. tim pelaksana bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Kedepujian Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2023

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,  
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SUKARYO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI  
PENGGERAKAN DAN INFORMASI  
NOMOR 6 /KEP. ADPIN/G3/2023 TENTANG  
TIM PEMANTAUAN PENURUNAN ANGKA  
*UNMET NEED* DAN PENINGKATAN KB PASCA  
PERSALINAN TAHUN 2023.

TIM PEMANTAUAN PENURUNAN ANGKA *UNMET NEED* DAN PENINGKATAN  
KB PASCA PERSALINAN TAHUN 2023

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penasehat	:	Kepala BKKBN
Pengarah	:	1. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi 2. Plt. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 3. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan 4. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus 5. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi 6. Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana 7. Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana 8. Plt. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi 9. Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik 10. Penyuluh KB Ahli Utama
Tim Pelaksana Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	:	1. Ridwan Fajri Nur, S.E. – Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan 2. dr. Mila Yusnita – Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan 3. Yunita, S.Sos. – Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan 4. Adam Sugiarto, S.E., M.Si. – Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan 5. Dwimartine Swesty S., S.Pd. – Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Nurazizah, S.E., M.S.M. – Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan</li><li>7. Susiin, S.Pd. – Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan</li><li>8. Farida Ekasari, S.IP., M.KM. – Direktorat Bina Penggerak Lini Lapangan</li><li>9. Masrinto Pongrambu, S.Sos. – Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga</li><li>10. Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., M.P.H. – Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi</li><li>11. Istiqomatul Fajriah Yuliaty, S.Si., M.Stat. – Direktorat Pelaporan dan Statistik</li><li>12. Nindi Widyakirono, A.Md. – Direktorat Pelaporan dan Statistik</li></ol>
Tim Pelaksana Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. dr. Poppy Irawati, M.P.H. – Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi</li><li>2. Lilik Aryani Falupi, S.S., M.P.H. – Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi</li><li>3. Retno Damayanti S., S.E. – Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi</li><li>4. dr. Sheilla Virarisca, M.P.H. – Direktorat Pelayanan KB Sasaran Khusus</li><li>5. dr. Tuty Sahara, M.Si – Direktorat Pelayanan KB Sasaran Khusus</li><li>6. dr. Desi Lokitasari – Direktorat Bina Akses Pelayanan KB</li><li>7. dr. Ruri Mutia, M.K.M – Direktorat Bina Akses Pelayanan KB</li><li>8. Ayu Rachmawati L., S.Si., M.K.M. – Direktorat Bina Akses Pelayanan KB</li><li>9. dr. Ratnasari Widyastuti – Direktorat Bina Akses Pelayanan KB</li><li>10. Lidya Dwijayani, S.K.M., M.K.M. – Direktorat Bina Akses Pelayanan KB</li></ol>

		11. dr. Mataram Endra Widagda – Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB 12. Dwi Ulumy, S.I.P., M.Si. – Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB
--	--	---

B. TUGAS TIM PEMANTAUAN PENURUNAN ANGKA *UNMET NEED* DAN PENINGKATAN KB PASCA PERSALINAN TAHUN 2023

1. Penasehat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Pemantauan Penurunan Angka *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan serta memberikan rekomendasi keputusan-keputusan yang akan diambil dalam Pemantauan Penurunan Angka *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan;
  - c. Memberikan evaluasi atas kegiatan Pemantauan Penurunan Angka *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan.
2. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Memberikan arahan kepada setiap penanggung jawab komponen dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penurunan *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan kegiatan Pemantauan Penurunan *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan;
3. Tim Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data terkait angka *Unmet Need* dan KB Pasca Persalinan.
  - b. Menyusun rencana tindakan yang dapat diimplementasikan secara efektif.
  - c. Menetapkan indikator kinerja dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak intervensi.

- d. Melakukan penilaian berkala terhadap keberhasilan program dan menyesuaikan strategi jika diperlukan.
- e. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemantauan Penurunan *Unmet Need* dan Peningkatan KB Pasca Persalinan.

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,  
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



  
SUKARYO TEGUH SANTOSO